

Implementasi Peraturan Bupati Tabanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang *Action Plan Tourism Models* di Desa Belimbing

I Gede Sumitra Jaya⁽¹⁾, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti⁽²⁾, Putu Dharmanu Yudharta⁽³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Pos-el: gedesumitrajaya@student.unud.ac.id⁽¹⁾, wiwin.fisip@gmail.com⁽²⁾,
p.dharmanu@gmail.com⁽³⁾

ABSTRACT

Regulation the Regent of Tabanan Number 24 on 2018th concerning the Action Plan Tourism Models for developing a tourist village in the Nikosake area. This policy aims to create new economic generator and develop existing potential in western Tabanan especially in Belimbing Village. This study has purpose is to find out how the development of Belimbing Tourism Village based on the Action Models of Tourism Models so as to provide social and economic change for the community. This study based on Van Meters and Van Horn theory about Policy Implementation and the results of this policy research in Belimbing Village have achieved good results in several indicators such as standards and targets, characteristics of organizations, organizations communication, and condition of social, economic, and political, but not maximal on resource indicators, characteristics of implementing organizations, and their attitudes. These deficiencies occur in large part due to problems in human resources and financial resources.

Keywords: *Implementation, Regional Development, Tourism Village, Nikosake*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan otonomi daerah mengharapkan setiap wilayah atau daerah untuk menggali segala potensi yang dimiliki daerahnya, sehingga bisa memberikan kontribusi positif. Inilah yang mendasari pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki potensi pariwisata untuk mengembangkan segala aspek pariwisata yang ada guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Letak yang strategis menjadikan Kabupaten Tabanan sebagai salah satu kabupaten

yang memiliki banyak destinasi pariwisata di Bali. Adanya 35 pariwisata terpopuler yang merupakan salah satu bagian dari 12 situs suci agama, 20 wisata alam dan taman, 6 tempat bersejarah, serta 19 tempat pemandangan alam dan tengara menjadikan kabupaten Tabanan memiliki banyak tempat untuk dikunjungi (Nugroho, 2019).

Keberagaman destinasi yang dimiliki pariwisata Tabanan lebih mengacu kepada destinasi pariwisata berbasis alam. Keberadaan destinasi berbasis alam tersebut ternyata ternyata menyaring

wisatawan, termasuk wisatawan nusantara maupun mancanegara yang datang di Bali untuk berwisata ke Kabupaten Tabanan. Hal diatas sesuai dengan pernyataan Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan bahwa kedatangan wistawan nusantara dan mancanegara ke Tabanan mengalami peningkatan selama beberapa tahun kemarin. Terhitung dari data kunjungan para wistawan nusantara dan wisatawan mancanegara di DTW yang ada di Kabupaten Tabanan tahun 2015—2017 pada tahun 2015 banyaknya para pengunjung hanya mencapai 4.764.579 pengunjung, sedangkan di tahun 2016 jumlah pengunjung mencapai 5.230.363 pengunjung, kemudian pada tahun 2017 jumlah pengunjung mencapai 5.333.823 pengunjung. Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa terjadi sejumlah peningkatan dalam kunjungan wisatawan di Kabupaten Tabanan (Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, 2017).

Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan rata-rata wisatawan yang menginap khususnya di Tabanan. Rata-rata lama menginap merupakan perbandingan antara jumlah malam tamu dibagi dengan jumlah tamu yang datang ke hotel dalam satu bulan. Angka ini menunjukkan durasi lama menginap seorang tamu pada suatu usaha jasa akomodasi. Oleh karena itu, angka ini dapat mencerminkan seberapa diminati suatu usaha jasa akomodasi oleh wisatawan untuk para wisatawan bisa tinggal dan menginap. Tahun 2017, rata-rata lama wisman menginap pada hotel non bintang berkisar antara 1—2 hari, lebih rendah dari rata-rata wisatawan yang

menginap di Bali yang berkisar 3—4 hari (Dwipa, 2017).

Berlandaskan pernyataan diatas maka Pemerintah Kabupaten Tabanan mengencarkan terus menerus pembangunan kawasan strategis pariwisata, yang salah satunya dengan mengeluarkan suatu peningkatan inovasi yang dilakukan guna menarik wisatawan datang dan tinggal di Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan melakukan berbagai pembahasan terkait pembangunan pariwisata berkelanjutan berbasis potensis alam di Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan membahas pembangunan ini dalam sebuah *Focus Group Discussion* (FGD) dan ditetapkanlah kawasan Nikosake sebagai potensi yang akan dikembangkan oleh Bappelitbang Pemerintah Kabupaten Tabanan. Hal ini disahkan melalui dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2018 tentang *Action Plan Tourism Models* yang melaksanakan pariwisata yang dikolaborasikan dengan mengembangkan usaha agribisnis terintegrasi serta kearifan lokal desa yang ada di kawasan Nikosake.

Nikosake (Nira, Kopi, Salak, dan Kelapa) merupakan potensi alam yang tersedia dan dikembangkan masyarakat lokal di Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan. Kawasan direncanakan akan berkembang pada 5 desa yaitu Desa Munduk Temu, Belimbing, Wanagiri, Sanda dan Desa Lumbang Kauh. Kayanya potensi alam di Tabanan Barat ini menumbuhkan potensi-potensi pariwisata baru yang berbasis alam beserta aktivitas pariwisatanya. Hal tersebut merupakan

dampak positif atas letak kawasan ini yang wilayahnya masih terjaga kehijauannya serta memiliki luas wilayah persawahan dan perkebunan yang masih tinggi di Provinsi Bali.

Desa Belimbing adalah salah satu desa wisata yang dikembangkan menjadi kawasan Nikosake. Desa Belimbing ini yang memiliki potensi wisata berbasis alam dan aktivitas pariwisata yang didasari atas kegiatan produksi nira. Hal itulah yang mendasari ditetapkannya Desa Belimbing ini sebagai Taman Gula Aren oleh Bappelitbang. Selain itu desa ini memang terkenal dengan keindahan sawah teraseringnya yang tidak kalah indah dengan yang dapat kita jumpai di kawasan Jatiluwih, Desa Belimbing ini juga lengkap dengan perkebunan pohon kelapa yang tumbuh di area persawahan petani. Luas lahan sawah di Desa Belimbing kurang lebih sekitar 460 ha. Beberapa penginapan dan hotel juga sudah dibangun di dekat desa lengkap dengan beberapa restoran dan warung sederhana, serta telah dijalkannya *homestay* untuk menunjang aktivitas pariwisata di kawasan ini.

Pemerintah Kabupaten Tabanan menjelaskan bahwa dalam pembangunan kawasan ini, dana yang digunakan tidak semata-mata bersumber dari APBD namun pemerintah kabupaten telah melakukan kerjasama dengan *stakeholder* yaitu Pemerintah Kanada. Nikosake ini merupakan kawasan KPPN (Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional) maka pelaksanaan program ini juga memperoleh bantuan dari pemerintah pusat. Pelaksanaan program ini Pemerintah

Kabupaten Tabanan menerima bantuan RIF (*Responsive Innovation Fund*) sebesar Rp 1.000.000.000,-. RIF (*Responsive Innovation Fund*) merupakan program yang mendukung gerakan daerah untuk mengembangkan potensinya selama 3 tahun (Suparta, 2018).

Berdasarkan jumlah pendanaan yang demikian memadai seharusnya pelaksanaan dari kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan terfokus dan baik. Namun berdasarkan observasi penulis terdapat beberapa permasalahan dari implementasi kebijakan ini yaitu *pertama* petani di desa ini belum memperoleh perubahan dalam perekonomian yang signifikan dan taraf hidup atas dikeluarkannya kebijakan tersebut. *Kedua* belum adanya transparansi dari pemerintah terkait bagaimana pengalokasian dana dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Belimbing. *Ketiga* Desa wisata Belimbing belum memiliki banyak wisatawan/pengunjung yang bersedia untuk menginap di desa. Hal ini selaras dengan pemaparan data sebelumnya, bahwa rata-rata tamu asing menginap pada tahun 2017 di hotel non-bintang Tabanan hanya berkisar antara 1—2 hari, lebih rendah dari rata-rata wisatawan yang menginap di Bali yang berkisar 3—4 hari (Agus Arsana Dwipa, 2017).

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Tabanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang *Action Plan Tourism Models*. Khususnya pada pengembangan Desa Belimbing?

Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis batasi hanya mengkaji sampai sejauh mana perkembangan dari Implementasi Peraturan Bupati Tabanan Nomor 24 Tahun 2018 ini di Desa Belimbing.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kebijakan ini dengan perkembangan Desa Belimbing di Kawasan Nikosake.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang terdapat pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis penelitian tentang pengembangan Kawasan Nikosake ini sekurang-kurangnya agar berguna sebagai salah satu sumbangan pemikiran.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu :
 1. Untuk Pemerintah Kabupaten Tabanan agar melaksanakan tugasnya sebagai penggerak agar Implementasi Pengembangan Desa Wisata Agribisnis Terintegrasi Berbasis Kearifan Lokal "Nikosake" di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dapat dilaksanakan dengan baik.
 2. Untuk penulis, penelitian ini sebagai alat untuk membuka pemikiran penulis terkait Implementasi Peraturan Pemerintah khususnya terkait Pengembangan Desa Wisata Nikosake di Desa Belimbing.

3. Untuk Masyarakat, penelitian ini diharapkan bisa mengedukasi masyarakat terkait Pengembangan Desa Belimbing sebagai desa wisata.

2.KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini disusun atas dukungan beberapa referensi penelitian lain atau penelitian sebelumnya yang serumpun. Penelitian pertama adalah penelitian dari Ismet E* dan Abuhjeeleh M (2016) yang berjudul "The Analysis of Tourism Policies by Different Governments and their Potential Implementation in North Cyprus Economy" Temuan utama dalam penelitian ini adalah Efektivitas cara kebijakan pariwisata dirumuskan, faktor ketika merumuskan kebijakan pariwisata, kendala yang menghambat kesuksesan penerapan kebijakan pariwisata di Siprus Utara di mana non-pengakuan politik muncul sebagai yang paling efektif untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Penelitian kedua yang terkait adalah penelitian dari Omoyini Victor Ajolor (2018) yang berjudul "The Challenges Of Policy Implementation In Africa And Sustainable Development Goals". Studi ini menemukan bahwa Nigeria dan sebagian besar negara di Afrika telah memasuki resesi ekonomi karena tantangan implementasi kebijakan seperti penetapan tujuan yang tidak realistis, patronase politik, pengabaian penerima manfaat sasaran, dan kurangnya pertimbangan lingkungan kebijakan. Adapun metode penelitian dalam jurnal ini yaitu dengan melakukan observasi dan menemukan populasi dan sampel penelitian. Konsep dari penelitian ini

menggunakan konsep implementasi kebijakan namun diukur secara kuantitatif menggunakan SPSS.

Penelitian ketiga yang terkait yaitu penelitian dari Hasan, Hubertus, Wijaya, Moses Gary (2017) yang berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Ciburial". Penelitian ini menunjukkan bahwa dari keseluruhan ketentuan yang telah dirumuskan, para pengelola BUM Desa Ciburial belum dapat terpenuhi. Ketidakpatuhan pengelola BUM Desa Ciburial disebabkan oleh kemauan yang rendah, serta rendahnya pemahaman terhadap Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015.

Penelitian keempat yang terkait adalah penelitian dari Ahmad Mustanir, Darmiah (2016) yang memiliki judul "Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpo Kabupaten Sidenreng Rappang". Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teori dari Edward III tentang implementasi kebijakan, dimana menurutnya kebijakan akan dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, serta struktur birokrasi.

Penelitian kelima adalah penelitian dari Rendra Setyadiharja, Suherry, Raja Dachroni (2018) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi

Kepulauan Riau". Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa, kebijakan yang di implementasikan dinilai telah berjalan dengan baik. Alasan tersebut dinilai baik karena didukung dengan baiknya tujuan kebijakan, baiknya keberadaan kapasitas SDM ataupun finansial, serta sikap para pelaksana kebijakan telah mengarah kepada tujuan kebijakan untuk kesejahteraan bersama, melalui kolaborasi yang optimal dan baik dalam tata kelola pemerintahan desa.

Persamaan dari kelima penelitian diatas dengan penelitian ini ada pada kajian yang akan dibahas yaitu *pertama* tentang implementasi atau pelaksanaan dari suatu kebijakan, kedua terkait konsep yang digunakan sama dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu konsep implementasi kebijakan publik, serta beberapa dari jurnal tersebut teknik pengumpulan datanya menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari kelima penelitian diatas yang pertama terletak pada lokasi penelitian yang berbeda, kedua konsep oleh ahli yang digunakan juga berbeda-beda, dan tentu perbedaan terakhir terletak pada indikator yang digunakan dalam masing-masing penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini, hal ini karena setiap teori menurut para ahli tentu memiliki perbedaan indikator variabel.

Landasan Teori

Kebijakan Publik

Kebijakan publik disebut juga sebagai suatu langkah konkrit yang akan diambil ataupun akan dilaksanakan oleh pemerintah dimana sebelum sebuah

kebijakan diterapkan dipilih terlebih dahulu salah satu kebijakan yang dirasa paling penting dan terbaik.

Implementasi kebijakan publik adalah suatu keadaan penyesuaian dengan kondisi politik. Dijelaskan dalam teori yang di kemukakan oleh Dunn dan Abidin bahwa dalam implementasi kebijakan publik, sang implementator harus tau apa yang akan dikerjakan dan kemudian keputusan tersebut harus diberikan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan/implementasi kebijakannya sasarannya semakin jelas.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam bukunya yang berjudul *A Model of the Policy Implementation* (1975), implementasi kebijakan publik merupakan gambaran suatu kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil kinerja yang maksimal dan tinggi. Model kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat di pengaruhi oleh:

1. Standar dan sasaran kebijakan,
2. Sumber daya,
3. Karakteristik organisasi pelaksana,
4. Sikap para pelaksana,
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan,
6. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik (Widiastuti AAN, 2017).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Implementasi Peraturan Bupati Tabanan Nomor 24 Tahun 2018 yang berisikan *Action Plan*

Tourism Models khususnya pengembangan Desa Belimbing ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang di bedakan menjadi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dapat langsung bisa memberikan data kepada peneliti dengan wawancara bersama narasumber, sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang tidak langsung didapatkan peneliti. Data sekunder ini dapat bersumber dari keterangan narasumber atau dokumentasi tambahan (Sugiyono, 2013:156).

Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini merupakan unit analisis kinerja suatu kebijakan. Unit analisis penelitian ini berupa instansi pemerintah yang melaksanakan Peraturan Bupati Tabanan No. 24 Tahun 2018 Tentang *Action Plan Tourism Model* di Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan.

Teknik Pengumpulan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan informan berupa *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu cara untuk mengambil sampel data dengan pertimbangan menentukan informan yang paling berpengaruh dan mereka yang paling informative, sehingga informan yang dipilih merupakan *key informan/informan kunci*.

Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Kadis Pariwisata Tabanan, Bappeda

Tabanan, Camat Pupuan, Perbekel Desa Belimbing, BUMDes Desa Belimbing, serta Ketua Kelompok Nira Harmoni satu dan dua.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mengandalkan pada observasi langsung, wawancara mendalam/indeph interview, serta review dokumen (Sugiyono, 2013:225)

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data pada penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa cara seperti reduksi data, pemaparan data, verifikasi dan penarikan kesimpulan serta triangulasi.

Teknik Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini digunakan teknik penyajian secara verbal dengan menggunakan kata-kata kemudian di susun menjadi kalimat berupa paragraf narasi agar mudah dipahami.

4. HASIL PENELITIAN

Hasil Temuan di Lapangan

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 24 Tahun 2018 tentang Action Plan Tourism Model telah menjelaskan bahwa pengembangan Kawasan Nikosake ini adalah untuk menggerakkan generator perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada sistem pertanian yang dikolaborasikan dengan pariwisata, menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat kemiskinan, dan meningkatkan rantai nilai petani melalui pengembangan kawasan terintegrasi berbasis kearifan lokal atau action plan tourism models.

Model ini akan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di dalam suatu kawasan dari aspek sosial ekonomi, sarana prasarana dan kearifan lokal. Model tersebut diintegrasikan menjadi sebuah model komprehensif yang disebut dengan *Action plan tourism models*. Model ini mensinergikan pengembangan sektor pertanian dan pariwisata sebagai satu kesatuan yang saling menunjang. Dalam Action Plan Tourism Models, dirancang penanganan sektor pertanian dan pariwisata secara terintegrasi. Aktivitas pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kearifan lokal dapat “dijual” dan memiliki ciri khas tersendiri sebagai magnet desa wisata baru.

Penerapan Action Plan Tourism Models di Kawasan Nikosake menjadi salah satu pilot project pengembangan agribisnis terintegrasi yang dilaksanakan berbasis dengan kearifan lokal dan pariwisata. Letak kawasan ini yaitu di wilayah barat Tabanan dan telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). KPPN terdiri dari 23 desa dan 5 kecamatan. Sementara Kawasan Nikosake terdiri dari desa Belimbing, Sanda, Munduktemu, Wanagiri, serta Lumbang Kauh.

Analisis Hasil Temuan

Standar dan Sasaran Kebijakan

Pencapaian standar serta sasaran dari kebijakan ini sudah cukup baik. Adapun tujuan dari pengembangan Desa Belimbing ini selain untuk mengembangkan sektor pertanian yang memberikan *multiplayer effect* sebagai destinasi wisata

baru, pemerintah juga memiliki maksud lain untuk mengurangi angka kemiskinan masyarakat Desa Belimbing. Namun sayangnya dalam penerapannya belum seluruh pihak mengetahui isi SOP yang dibuat oleh Bappeda Tabanan serta belum semua dari tujuan yang ditetapkan telah tercapai.

Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Sumber daya manusia atau pelaksana dari kebijakan ini meliputi Bappeda Kabupaten Tabanan, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, serta masyarakat Desa Belimbing. Hanya saja dalam pelaksanaannya tidak ada bidang yang secara khusus untuk melaksanakan pengembangan desa wisata di Desa Belimbing ini, baik itu dari Bappeda maupun Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan. Sedangkan sumber daya finansial dalam kebijakan ini adalah pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam APBD, maupun bantuan dari pemerintah pusat berupa RIF, dan kerjasama dengan pemerintah Kanada. Lalu untuk sumber daya waktu yang dimaksud adalah jangka waktu pelaksanaan kebijakan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana dalam implementasi pengembangan Desa Wisata Belimbing ini dapat dilihat dari kualitas para pemangku kebijakan. Namun sayangnya dalam indikator ini pelaksanaan kebijakan ini belum berjalan dengan maksimal karena belum adanya tim

pengawas yang khusus untuk mengawasi implementasi kebijakan ini. Selain itu BUMDes juga dinilai belum bekerja secara maksimal untuk menarik produk hasil olahan petani dan belum maksimal dalam pemasarannya. Hal ini dikarenakan BUMDes Desa Belimbing lebih berorientasi pada bidang simpan pinjam, bukan pemasaran produk petani.

Sikap Para Pelaksana

Pertama terkait pemahaman tujuan kebijakan ini, para pelaksana kebijakan yakni BUMDes, BUMD, Bappeda Kabupaten Tabanan, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan maupun Pemerintah Kanada telah satu tujuan yakni selain menciptakan sebuah desa wisata yang unik, juga sepakat untuk menurunkan tingkat kemiskinan masyarakat Desa Belimbing.

Kedua terkait respon pihak yang terkait, baik itu pemerintah maupun masyarakat telah menunjukkan sikap yang positif serta diterima dengan baik oleh masyarakat serta pemerintah yang melaksanakannya. Ketiga adalah intensitas pelaksanaan program oleh pemerintah dimana pelaksanaan ini dilihat jumlah dari sosialisasi yang dilakukan oleh Bappeda Tabanan beserta seluruh *stakeholders* yang terkait. Namun hingga saat ini sosialisasi yang diberikan baru sebanyak satu kali kegiatan saja yang tercatat.

Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi oleh organisasi-organisasi yang terlibat dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung. Namun di indikator ini penerapan kebijakan ini di Desa Belimbing sudah berjalan dengan baik. Selama ini komunikasi

langsung maupun tidak langsung yang terjalin antara pihak yang saling berkaitan telah berjalan dengan baik. Namun apabila salah satu pihak membutuhkan sesuatu maka pihak tersebut dapat berjalan secara langsung bertemu ataupun tidak langsung dengan melalui ponsel (*whatsapp*) saja. Adapun pihak-pihak ini adalah Bappeda Kabupaten Tabanan, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, Pemerintah Kanada, serta Pemerintah Desa Belimbing.

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Pertama dari segi kondisi sosial masyarakat Desa Belimbing sudah jauh membaik dari sebelum kebijakan ini diterapkan. Perubahan yang terlihat terutama pada kondisi infrastruktur jaalan yang sudah sangat baik dan pemaandangan rumah-rumah masyarakat tidak ada yang tergolong kumuh, hampir semua rumah yang penulis lihat sudah layak tinggal.

Kedua, dari segi kondisi perekonomian masyarakat di Desa Belimbing, dimana dalam indikator ini masyarakat desa masih banyak yang tergolong miskin yaitu sejumlah 614 penduduk yang miskin, hal ini disebabkan oleh pekerjaan masyarakat Desa Belimbing sebagian besar menjadi petani dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Namun hal ini sudah jauh membaik dibandingkan tahun sebelumnya dimana jumlah masyarakat miskin mencapai 876 penduduk.

Ketiga terkait kondisi politik, berdasarkan hasil observasi penulis bahwa dalam pengembangan kawasan ini khususnya di Desa Belimbing tidak adanya

intervensi politik yang bersifat negatif, para pelaku politik yang ada di desa sepakat untuk turut membantu pelaksanaan program ini dengan melaksanakan lobi dengan partai politiknya. Artinya pengaruh tokoh-tokoh politik yang ada justru membuat kebijakan ini ada, dimana kebijakan ini awalnya diusulkan oleh tokoh-tokoh politik yang ada di desa.

Rekomendasi Kebijakan

1. Bappeda Kabupaten Tabanan selaku perencana dan penetap wajib memberikan SOP yang telah dibuat kepada seluruh pihak yang terlibat agar sasaran yang ingin dicapai dapat dipahami oleh para pelaksana yang lain.
2. Perlu diadakannya pelatihan secara berkala terhadap SDM yang ada di Desa, karena penyelenggaraan pelatihan yang telah dilaksanakan dirasa kurang oleh masyarakat yang ada di desa. Serta pemerintah desa perlu untuk melakukan kerjasama dengan investor lain terkait pendanaan untuk membeli mesin pembuatan gula kristal di Desa Belimbing.
3. Bappeda Kabupaten Tabanan seharusnya wajib melaksanakan pengawasan secara berkala ke Desa terkait agar pelaksanaan peraturan bupati ini dapat berjalan sesuai dengan SOP dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Perlu adanya pemberian penghargaan atau apresiasi secara berkala kepada para pelaksana dari Pemerintah Kabupaten Tabanan agar para pekerja

semakin semangat dalam melaksanakan program ini.

5. Perlu diadakannya komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui sosialisasi secara berkala, agar pemerintah mampu menampung segala aspirasi masyarakat.
6. Program ini harus terus didukung dengan pendanaan yang memadai agar kondisi sosial, dan ekonomi di Desa Belimbing semakin membaik. Dalam hal ini dibutuhkan peranan dari tokoh politik baik di desa maupun di daerah untuk saling berkomunikasi meminta tambahan anggaran agar program ini semakin dirasakan dampaknya oleh masyarakat sekitar.

5. PENUTUP

Kesimpulan

1. Terkait standar dan sasaran kebijakan pelaksanaan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 24 Tahun 2018 dalam pengembangan Desa Wisata Nikosake di Desa Belimbing ini belum berjalan dengan maksimal, sebab terdapat indikator yang belum tercapai terkait penciptaan perdes dan MOU. Serta belum semua pihak yang terlibat mengetahui akan SOP yang telah ditetapkan oleh Bappeda Kabupaten Tabanan ini, sehingga pihak-pihak yang terkait belum bersinergi dengan maksimal.
2. Terkait sumber daya dalam pengembangan Desa Wisata Belimbing ini masih terdapat beberapa kendala. Adapun masalah tersebut terkait lemahnya SDM yang ada serta pendanaan yang belum cukup untuk memenuhi segala standar yang telah ada, serta sumber pendanaan yang masih kurang untuk meningkatkan produksi gula Kristal di Desa Belimbing.
3. Terkait karakteristik organisasi pelaksana, bahwa dalam implementasi program ini organisasi-organisasi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan karakteristik dan tupoksi yang ada. Hanya saja dalam bidang pemasaran oleh BUMDes Desa Belimbing belum terlaksana dengan maksimal. Serta dalam implementasi kebijakan ini belum adanya tim pengawas langsung dari Bappeda Tabanan yang mengakibatkan belum adanya waktu yang pasti terkait evaluasinya.
4. Terkait sikap para pelaksana, dalam program ini para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya lebih dipengaruhi oleh faktor kejujuran yaitu adanya keinginan tulus dari masing-masing organisasi pelaksana untuk membenahi kondisi masyarakat Desa Belimbing. Selain itu belum adanya apresiasi yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk para bawahannya dalam pengembangan kawasan Nikosake ini.
5. Terkait komunikasi antar organisasi, para pelaksana melakukan komunikasi dengan baik, namun disisi lain masih ada beberapa hal yang harus disamakan persepsi dengan masyarakat bahwa keberadaan program ini bertujuan untuk membantu perekonomian mereka.
6. Terkait kondisi sosial, ekonomi, dan politik, kebijakan ini justru memberikan

dampak yang baik bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Belimbing terbukti dari jumlah RTS yang semakin menurun. Serta dalam penerapan kebijakan ini tidak ada intervensi politik yang buruk, artinya selama ini adanya tokoh-tokoh politik di desa dan daerah justru turut membantu untuk mengembangkan kawasan ini.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, agar penyelenggaraan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 24 Tahun 2018 ini semakin berjalan dengan baik maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bappeda Kabupaten Tabanan selaku perencana dan penetap wajib memberikan SOP yang telah dibuat kepada seluruh pihak yang terlibat.
2. Perlu diadakannya pelatihan secara berkala terhadap SDM yang ada di Desa.
3. Bappeda Kabupaten Tabanan wajib melaksanakan pengawasan secara berkala.
4. Perlu adanya pemberian penghargaan atau apresiasi kepada para pelaksana kebijakan ini.
5. Perlu diadakannya komunikasi yang baik dengan masyarakat melalui sosialisasi secara berkala.
6. Program ini harus terus didukung dengan pendanaan yang memadai agar kondisi sosial, dan ekonomi di Desa Belimbing semakin membaik. Dalam hal ini dibutuhkan peranan dari tokoh politik baik di desa maupun di daerah.

6. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta : Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2014. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta; Bandung
- Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tabanan. 2018. Action Plan Tourism Models
- Dwipa AA. 2018. Buku Perkembangan Pariwisata Kabupaten Tabanan, Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan. BPS Kabupaten Tabanan; Tabanan.
- Grindle, Marilee S, (ed). 1980. Politics and Apolicy Implementation in the Third World. Jakarta; Murai Kencana
- Harbani Pasolong. 2007. Teori Administrasi Publik. Alfabeta; Makassar
- Nugrho, D Riant. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang: Model-Model Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta; PT Gramedia Jakarta
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta; Bandung
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung; Alfabeta
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif; Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterprentif, Interaktif, dan Konstruktif. Bandung; Alfabeta
- Wattimena Reza A.A. 2016. Demokrasi, Dasar Filosofis dan Tantangannya. PT Kanisinus; Daerah Istimewa Yogyakarta

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus. CAPS; Yogyakarta

Peraturan Pemerintah:

Peraturan Bupati Tabanan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Action Plan Tourism Models.
http://jdih.tabanankab.go.id/page/produk_hukum/28601. Diakses pada Selasa, 5 November 2019 Pukul 18:17 WITA

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan 2016—2021.
https://drive.google.com/file/d/1h_ZUJa0W8m8fgVJVP1CjQ4MNZNh6p4lb/view. Diakses pada Selasa, 5 November 2019 Pukul 18:17 WITA

Rencana Strategis Kecamatan Pupuan 2016—2021.
<https://drive.google.com/file/d/1IGYwad41PxJe7Sv2ciUvYCUwGvxgqCMS/view>. Diakses pada Selasa, 5 November 2019 Pukul 18:17 WITA

Jurnal:

Ahmad Mustanir, Darmiah. 2016. Implementasi Kebijakan Dana Desa dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Jurnal. STISIP Muhammadiyah Rappang

Hasan, Hubertus, Wijaya, Gary Moses. 2017. Implementasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Ciburial. Jurnal. Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik. Universitas Katolik Parahyangan

Ismet E, Abujeleh M. 2016. The Analysis of Tourism Policies by Different Governments and their Potential Implementation in North Cyprus Economy. Jurnal. Department of Tourism and Hospitality Management, Hospitality and Tourism Management School, Girne American University, Cyprus

Omoniyi Victor Ajulor. 2018. The Challenges Of Policy Implementation In Africa And Sustainable Development Goals. Jurnal. Department of Public Administration, Faculty of Management Sciences, Lagos State University, Ojo – Nigeria

Prio Asmoro, Seto. 2015. Pemanfaatan Campuran Kulit Kayu Nangka Dan Kapur Sebagai Pengganti Sabun Untuk Menghambat Fermentasi Nira Kelapa. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Rendra Setyadiharja, Suherry, Raja Dachroni. 2018. Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal. Program Studi Ilmu Pemerintahan. Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang

Internet:

Amar Qonitakumariah. Model-Model Impementasi Kebijakan Publik.
https://www.academia.edu/28653761/Model-Model_Impementasi_Kebijakan_Publ

- ik. Diakses pada 8 April 2019, Pukul 08:00 WITA
- Badan Pusat Statistik Provisi Bali. 2018. Luas Lahan Per Kabupaten/Kota Menurut Penggunaannya, 2017. <https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/11/72/luas-lahan-per-kabupaten-kota-menurut-penggunaannya-di-provinsi-bali-2017.html>. Diakses Pada 8 September 2019 Pukul 12:41 WITA
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. 2019. Perkembangan Pariwisata Bali Januari 2019. <https://bali.bps.go.id/pressrelease/2019/03/01/717182/perkembangan-pariwisata-bali-januari-2019.html>. Diakses Pada Kamis, 14 Maret 2019 Pukul 14:05 WITA
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan. 2018. Kecamatan Pupuan Dalam Angka 2017. <https://tabanankab.bps.go.id/publication/2017/09/14/82b33d89065376432a536c3e/kecamatan-pupuan-dalam-angka-2017.html>. Diakses Pada Selasa, 5 November 2019 Pukul 17:05 WITA
- Bisnis Bali. 2018. Implementasi Konsep Nikosake mulai dari Desa Lumbung Kauh. <https://bisnisbali.com/2018/07/13/12503/>. Diakses Pada Kamis, 14 Maret 2019 Pukul 14:05 WITA
- Berita Bali. 2018. Palm Sugar Park Desa Belimbing Diluncurkan di Kawasan Nikosake. <https://beritabali.com/read/2018/08/20/201808200020/Palm-Sugar-Park-Desa-Belimbing-Diluncurkan-di-Kawasan-Nikosake.html>. Diakses pada 18 Maret 2019, Pukul 12:31 WITA
- Desa Belimbing. 2016. Profil dari Website Resmi Desa Belimbing. <https://desabelimbing.desa.or.id/first/artikel/92>. Diakses pada Selasa, 5 November 2019, Pukul 18:00 WITA
- Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan. 2019. Profil Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan. <https://dispar.tabanankab.go.id/>. Diakses pada Selasa, 5 November 2019, Pukul 18:00 WITA
- Hikmah Nurul. 2018. Pemkab Tabanan Bahas Pengembangan Kawasan Nikosake, Libatkan 50 Ahli. <https://economy.okezone.com/read/2018/05/18/320/1899758/pemkab-tabanan-bahas-pengembangan-kawasan-nikosake-libatkan-50-ahli>. Diakses Pada Kamis, 14 Maret 2019 Pukul 14:05 WITA
- Kecamatan Pupuan. 2019. Profil dari Website Resmi Kecamatan Pupuan. <https://pupuan.tabanankab.go.id/>. Diakses pada Selasa, 5 November 2019, Pukul 18:00 WITA
- Nugroho Adi. 2019. 39 Daftar Keindahan Wisata Kota Tabanan Terbaru dan Terlengkap. <https://ihategreenjello.com/39-daftar-keindahan-wisata-kota-tabanan/>. Diakses Pada Kamis, 21 November 2019 Pukul 23:33 WITA
- Nusa Bali. 2018. Masuk 10 Besar Finalis Penghargaan Pembangunan Daerah, Tabanan Gelar FGD.

- <https://www.nusabali.com/berita/49837/masuk-10-besar-finalis-penghargaan-pembangunan-daerah-tabanan-gelar-fgd>. Diakses pada 18 Maret 2019, Pukul 12:31 WITA
- Patria Robby. 2018. Bappelitbang Tabanan Kembali Mantapkan Nikosake Melalui FGD II. <https://www.beritabali.com/read/2018/06/07/201806070008/Bappelitbang-Tabanan-Kembali-Mantapkan-Nikosake-Melalui-FGD-II.html>. Diakses Pada Kamis, 14 Maret 2019 Pukul 14:05 WITA
- Risnandar C. 2018. Buah Kelapa. <https://jurnalbumi.com/knol/buah-kelapa/>. Diakses pada 7 Oktober 2019, Pukul 12:31 WITA
- Risnandar C. 2018. Buah Salak. <https://jurnalbumi.com/knol/buah-salak/>. Diakses pada 7 Oktober 2019, Pukul 12:31 WITA
- Saputra Endang. 2019. Masuk 10 Besar Finalis PPD, Pemkab Tabanan Gelar FGD. <https://m.merdeka.com/tabanan/info-tabanan/masuk-10-besar-finalis-ppd-pemkab-tabanan-gelar-fgd-190409o.html>. Diakses pada 5 Oktober 2019, Pukul 10:31 WITA
- Suparta Komang. 2018. Tabanan terima bantuan 'RIF' untuk program inovatif 'NIKOSAKE'. <https://bali.antaranews.com/berita/126505/tabanan-terima-bantuan-rif-untuk-program-inovatif-nikosake>. Diakses pada 18 Maret 2019, Pukul 12:31 WITA
- Sorikmas. 2012. Konsep Dasar Pembangunan Berkelanjutan. <http://www.sorikmas.co.id/2012/06/12/konsep-dasar-pembangunan-berkelanjutan/>. Diakses pada 5 Oktober 2019, Pukul 10:31 WITA
- Purwanto IS. 2017. Konsep Kearifan Lokal. <http://eprints.umm.ac.id/35955/3/jiptu-mmpp-gdl-irawansatr-48429-3-babiip-f.pdf>. Diakses pada 18 Maret 2019, Pukul 12:31 WITA